

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, S.H dan M. Ali Safa<sup>at</sup>, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Alkatiri, Nadhif, dkk , 2021 *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I), 2014, Buku Kedua : *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sandra Dewi, 2021, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Insan Cendekia Mandiri (Grup Penerbitan CV Insan Cendekia Mandiri), Solok.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-14, Alfabeta, Bandung.

Tan Thong Kie, 2000, *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Adnan Fawwaz Hadju, *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juni 2023, 9(12), 1-8.

Alifa, Benny Djaja, Maman Sudirman, *Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal sosial dan Teknologi Volume 4, Number 12, Desember 2024.

Bimo Kusumo Putro Indarto, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.4 July 2024.

Candra Wijaya Nitihardjo, Habib Adjie, *Kewenangan Notaris Dalam Mengenal Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum*, Istinbath, Jurnal Hukum Vol. 20, No. 1, 2023.

Ditjen AHU, *Perpres 13/2018, 'Membedik' Pelaku TPPU Identifikasi Penerima Manfaat Korporasi*, AHU Magz, Ed. 06, Desember 2018.

Fahrurozi, *Optimalisasi Data Beneficial Ownership, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF*, AHU Magz Edisi 11, 2020

FATF Guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, Oktober, 2014

Gerald Christopher Pandawa, Telly Sumbu Betsy A. Kapugu Penerapan Sanksi Administrasi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Apabila Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan Hukum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, *Lex Privatum* Vo.13.No.2. Jan.2024.

Ichsan Aulia, Kholis Roisah, *Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum*, Vol. 5, No. 3, Januari 2025, hlm 2501.

Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki dan Ratna Kumala Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *IBLAM LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 2, 2024.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016.

Tri Murti Lubis, Robert, Joiverdia dan Hadyan Yunhas Purba, *Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara*, *Milthree Law Journal* Vol. 1 No. 2 Juli 2024.

### C. Website/wawancara

Diakses pada Portal Ahu dengan halaman website <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4709-dorong-pelaporan-bo-langkah-strategis-menuju-transparansi-korporasi> pada tanggal 01 Juni 2025.

ICW dan LSM Transparency International Indonesia, *Evaluasi Pelaporan BO melalui Sistem AHU*, 2022.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Teknis Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi melalui AHU Online*, 2023.

Wawancara kepada Notaris MN di Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2025

Wawancara dengan Notaris AP Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris CD Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris DEKA Kecamatan Pekanbaru kota di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris DE Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris M Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris R Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Notaris HB Kecamatan Rumbai di Kota Pekanbaru

#### **D. Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

1.



